BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnansi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998.Suatu kondisi perekonomian yang tidak menentu, seringkali terjadi adanya keterpurukan dalam dunia usaha, sehingga akan terjadi kemunduran dalam sekor usaha dan kehidupan. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif.²

UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. Hal tersebut diperlukan karena dunia semakin kompetitif dan hanya negara yang memiliki

¹Adil Makmur Santosa, "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UKM Kota Bekasi", *Jurnal Parameter*, Vol.2, No.2, 2017, hlm.47

² Edy Dwi Kurniati, *Kewirausahaan Industri*, (Yogyakarta: Depublish, 2015) hlm. 124

masyarakat yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang mampu menunjukkan keadidayaan di masa globalisasi ini. Jiwa kewirausahaan sangat diperlukan dari sikap-sikap seperti : ulet, tangguh, kreatif, inovatif, dinamis, beretos kerja tinggi, efisien, disiplin, visioner, antisipatif, mampu menciptakan peluang baru, berani mengambil keputusan yang tepat sehingga memperkecil risiko.³

Undang-Undang Dasar kita menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian indonesia. Atas dasar itu maka koperasi sebagai suatu lembaga yang memungkinkan koperasi untuk berkembang secara ekonomis, dan dengan demikian tidak saja akan mampu memberikan pelayanan terus menerus dan meningkat kepada anggotanya serta masyarakat sekitarnya, akan tetapi juga akan memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Peran koperasi tetap bertahan sebagai salah satu pilihan sadar untuk dijadikan bagian dari kebijakan pembangunan guna pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Terbukti koprasi hingga saat ini tetap masuk dalam bagian program pembangunan yang dijalankan pemerintah sekarang termasuk dalam pengembangan dan pelatihan UKM di Kabupaten atau Kota Daerah Indonesia.

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat

³Edy Dwi Kurniati, Kewirausahaan Industri....., hlm.124

-

 $^{^4\}mathrm{Sudarsono}$ dan Edilus, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) Hlm. 31

⁵ Harsoyo.dkk., *Ideologi Koperasi Menatap Masa* Depan, (Tangerang, Agromedia Pustaka, 2006)Hlm.158

dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: (a) memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan, (b) meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, (c) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan danpelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kediri meningkat setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2014 terdata sekitar 26.000 usaha dan kemudian naik menjadi 31.000 usaha pada tahun 2015. Tumbuhnya sektor-sektor tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya

⁶Feni Dwi Anggraeni,dkk., "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, No.6,

hlm.1288

pertumbuhan ekonomi dan juga penurunan angka kemiskinan. Dari beberapa UMKM di Kabupaten Kediri, sebagiansudahada yang naikkelasdanproduknyaditampung di berbagaipasar modern baik di dalammaupunluardaerah Kediri.⁷ Hal tersebut sangat berkaitan dengan UMKM industri makanan harus memperhitungkan harga pokok produksinya sehingga mampu mencapai laba yang di harapkan.⁸

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Propinsi Jawa Timur, khususnya Kabupaten Kediri sangat strategis dalam rangka peningkatan perekonomian. Ketangguhan UMKM telah terbukti sebagai jaring pengaman perekonomian disaat perusahaan besar banyak yang gulung tikar. Untuk itu pengembangan UMKM di Kabupaten Kediri ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius dalam rangka peningkatan kemampuan pengusaha untuk bersaing pada pasar regional dan internasional. Sektor ekonomi kreatif berkembang pesat dan dapat dirasakan pada perkembangan UMKM di Kabupaten Kediri.

Perkembangan UMKM itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, atau disingkat menjadi DISKOPUSMIK yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Diskopusmik mempunyai peran penting dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

⁷Hermin Istiasih, "Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Untuk Usaha Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Kediri", Vol.2, No.1, 2015, hlm. 3

⁸Aini Nuraeni Farijah,dkk., "PenetapanHargaJualProduk(UMKM) DiSabumiDenganMenggunakanMetode Cost Based Pricin", *Jurnal An-Nisbah*, Vol.5, No.1, 2018, Hlm. 318

_

wewenang daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. ⁹Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan.

Tabel 1.1
PeranDiskopusmik Kabupaten Kediri dalam melakukan upaya dan langkah- langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat

No.	Program	No	Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Peningkatan dan Pengelolaan administrasi perkantoran
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	Pembangunan dan pemelihaaan rutin atau berkala gedung kantor
3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	Diklat peningkatan SDM aparatur
4.	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan	1	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dinas
5.	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah	1	Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM
6.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2	Penyelenggaraan promosi produk UMKM
		3	Pembinaan dan Pengembangan UMKM
		1	Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
		2	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Sumber data : Buku Rencana Kerja Diskopusmik Tahun Anggaran 2017

Dalam melaksanakan tugasnya, Diskopusmik memiliki modelatau pola pengembangan UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara melaksanakan program pengembangan Usaha Mikro, Kecil,

_

⁹Peraturan BUPATI Kediri No.48, *Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Tata Kera Diskopusmik Kabupaten kediri* (Kediri: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2016), hlm.5

dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. ¹⁰Untuk mencapai visi, misi dan tujuan, Diskopusmik menetapkan sasaran :

- a. meningkatkan produktifitas kerja guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk
- meingkatkan pengembangan, kerjasama usaha dan peluang usaha serta info usaha
- c. meningkatkan kualitas kerja SDM pengelola koperasi yang sehat dan berkualitas serta terjalinnya kemitraan usaha yang berdasarkan pada pertambahan nilai dan hubungan yang saling menguntungkan.
- d. Mengembangkan usaha produk UMKM yang berkualitas sesuai sektor pasar erbasis potensi daerah
- e. Meningkatkan kualitas produktifitas kinerja pegawai, dengan mengutamakan efisiensi dan efektifitas tatanan administrasi dinas.¹¹

Bagian Diskopusmik ini terdapat Sub Bagian Koperasi dan Pengusaha Mikro Kecil Menengah (PMKM), dibawahnya terdapat Kasi Pengusaha Mikro, Kecil Menengah Dan Kemitraan, Disinilah peran

¹¹Rencana Kerja, (Kediri: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2017), hlm. 25

pengembangan yang dilakukan pemerintah kabupaten Kediri, yang ditujukan pada para pengusaha UKM di wilayah kabupaten kediri, dalam penyelenggaraanya terdapat pembinaan bimbingan, pemberdayaan, pengembangan serta pengawasan Pengusaha Mikro Kecil Dan Menengah.¹²

Berdasarkan telaah kebijakan nasional Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam menyusun program dan kegiatan sudah menyesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yaitu Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM, Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi UMKM dan di dukung oleh program-program yang lain sesuai dengan potensi daerah.

Dalam pengembangan UMKM, langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak internal yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Karena potensi yang mereka miliki mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui Diskopusmik Kabupaten Kediri. 13

¹²Peraturan BUPATI Kediri No.48, *Kedudukan, Susunan Organisasi.....*, Hlm. 2

¹³ Feni Dwi Anggraeni,dkk., "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah....., hlm.1287

Hal ini sangat melibatkan peran pelaksanaan program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri yang secara umum membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan ikut memerangi bank titil atau rentenir, sekaligus ikut serta menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Peran utama dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri ini adalah melayani masyarakat dalam mengembangkan Usaha nya. Dinas ini siap melayani dan memfasilitasi berbagai pelatiha-pelatihan usaha. Baik pengadaan dari masyarakat sendiri maupun dari Dinas.

Tugas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kediri dalam pengembangan sektor UMKM ini tidak hanya difokuskan pada kuantitasnya saja, akan tetapi pada segi kualitasnya juga. Dibalik banyaknya sektor UMKM yang berkembang di Kabupaten Kediri ini, masih banyak permasalahanyang dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM tersebut. Permasalahan- permasalahan itu antara lain : lemahnya aksese terhadap pasar, lemahnya akses terhadap sumber permodalan, lemahnya akses terhadap manajemen, lemahnya akses terhadap teknologi, dan lemahnya akses terhadap kemitraan usaha.

Hambatan-hambatan tersebutlah yang menjadi titik fokus Dinas Koperasi dan Usaha Mkiro dalam mengembangkan sektor UMKM di Kab.Kediri, sebab hal-hal tersebut dapat menyebabkan jalannya usaha UMKM sulit untuk berkembang secara optimal. UMKM perlu dilakukan untuk memperkuat posisi transaksi dalam persaingan pasar dan kemitraan

antara ketiga pelaku ekonomi, yaitu BUMN, Swasta dan KUKM. Upayaupaya peningkatan akses terhadap pasar, modal, manajemen, teknologi,
serta penguatan pengembangan usaha, dapat dilakukan dengan cara
memberikan akses UMKM terhadap fasilitasi sumber permodalan,
mengadakan pembinaan dan pelatihan, kegiatan promosi produk, dan
memperluas pemasaran produk.

Penelitian ini memfokuskan pada masalah pngembangan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri terhadap pengusaha-pengusaha UKM pada lingkup wilayah kabupaten Kediri. Kegiatan yang ada pada Dinas ini yang penulis teliti adalah salah satu kegitan yang berada pada Sub Bagian Koperasi dan Pengusaha Mikro Kecil Menengah (PMKM), yang dimana didalamnya terdapat kegiatan pembinaan, pengembangan, dan kelembagaan sehingga dari kegiatan tersebut sangat membantu meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Kediri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal pada kelompok usaha. maka dari itu, Masalah yang diangkat penulis dalam pengembangan yang dilakukan Diskopusmik terhadap para pengusaha di Kabupaten Kediri adalah terdapat pada proses berjalanya pengembangan kepada masyarakat yang dilakukan. Berdasarkan pemaparan diatas, akan dilakukan penelitian yang berjudul "Pola dan Peran Pengembangan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopusmik) Kabupaten Kediri".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti memfokuskan penelitian dalam berbagai hal sebagai berikut:

- Bagaimana pola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menumbuhkan wirausaha masyarakat ?
- 2. Bagaimana Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi?
- 3. Apasaja Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar latar belakang yang di uraikan diatas, maka penulis mempunyai tujuan. Tujuan penelitian akan mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Berdasarkan permasalahan penelitian, secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang Peran dan Pola Pengembangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri bagi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. Secara khusus tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya meliputi :

 Mengetahui pola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menumbuhkan wirausaha masyarakat

- Mengetahui Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dilakukan dengan lebih fokus dan mendalam, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan pnelitian dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Pola dan Peran membangun perekonomian masyarakat Kabupaten Kediri yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri.
- b. Kendala atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi membangun perekonomian masyarakat Kabupaten Kediri yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri.
- c. Solusi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan khususnya manajemen pemasaran, yang berkaitan dengan strategi membangun loyalitas pelanggan pada perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing. Serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan sejenis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini, diantaranya diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak, diantaranya:

a. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan pengambilan keputusan atau kebijakan terkaitdengan strategi membangun loyalitas pelanggan untuk mencapai keunggulan bersaing.

b. Bagi Akademik

Sebagai sumbangsih perbendaharaan kepustakaan di IAIN
Tulungagung dalam bidang strategi pemasaran.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Sebagai rujukan atau referensi untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian pada tema yang sama.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Dikopusmik

Diskopusmik adalah singkatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro serta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun

potensi daerahnya.¹⁴ Implementasi undang-undang otonomi daerah tersebut juga mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan dalam bentuk pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM di setiap daerah.¹⁵

b. Pola

Pola adalah rangkaian unsur-unsur yangsudah mantap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri. Daridefinisi di atas dapat di ketagui bahwa pola adalah cara kerja yang terdiri dari unsur-unsur terhadap suatu perilaku dan dapat di pakai untuk menggambarkan atau mendeskripsikan gejala perilaku itu sendiri.

c. Peran

Peran adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam kemasyarakatan. Posisi dalam masyarakat merupakan unsur

¹⁴Hesti Kusuma WAP,dkk., "Peranan Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, No.2, hlm.213

¹⁵Harsoyo,dkk., *Ideologi Koperasi*.... Hlm. 156

¹⁶ Suyoto, Kamus Antropologi, 1985, Hlm. 327

statis yang menunjukkan tempat pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.¹⁷

d. Pengembangan

Pengembangan merupakan proses, cara, perbuatan mengembangkan, sedangkan mengembangkan merupakan perintah yang selalu berusaha dalam pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus pada sasaran yang dikehendaki. ¹⁸Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pengembangan merupakansuatu upaya untuk meningkatkan segala aspek dalam tubuh organisasi agar mengarah pada pencapaian tujuan

e. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerakpada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Kemunculan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) membawa pengaruh positif pada perekonomian. Usaha mikro dan usaha kecil merupakan usaha informal yang mulai dimunculkan dengan melihat peluang yang ada disekitar.

¹⁷Dwi Sepriono Nur, "Peran Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.5, No.2, 2017, hlm.5859

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), Hlm.414

2. Definisi Operasional

Penelitian ini adalah suatu upaya untuk mengetahui Pola dan peran pemerintah terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang di lakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri agar masyarakat menjadi wirausaha yang berkompeten dan konsisten untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan pedoman skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Tulungagung 2017. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:¹⁹

 Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

_

¹⁹Pedoman Penyusunan Skripsi IAIN Tulungagung Tahun 2017, Hal. 14

- 2. Bagian utama, terdiri dari: Bab I pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah (bila perlu), manfaat penelitian, (f) penegasan istilah, sistematika pembahasan. Bab II kajian pustaka, meliputi: landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka konseptual. Bab III metode penelitian, meliputi; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Bab IV hasil penelitian, meliputi: paparan data dan temuan penelitian. Bab V pembahasan, (analisis hasil temuan melalui teori,penelitian terdahulu dan teori yang ada). Bab VI penutup, meliputi: (a) kesimpulan dan saran/rekomendasi.
- 3. Bagian akhir, terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.